



Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa TA 2022

Wabup Sebut Pengawasan Keuangan Desa Belum Optimal

MEMPAWAH--Menurut Muhammad Pagi, alokasi anggaran dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penggunaan anggaran dana desa itu sendiri akan difokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa serta program pemberdayaan masyarakat desa.

"Saat ini, kita masih dihadapkan pada penyerapan dan pelaksanaan pembangunan desa yang terlambat, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pelaporan keuangan desa tidak tepat waktu dan pengawasan keuangan desa belum optimal," papar Wabup.

Padahal, sambung dia, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran merupakan kunci penting untuk mencapai percepatan penanaman

dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di masyarakat desa.

"Maka diperlukan upaya kolaboratif dalam rangka membangun sinergitas di level pusat, daerah dan desa. Partisipasi aktif dari seluruh komponen menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian dana desa di Kabupaten Mempawah," tegasnya.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan keuangan desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang diikuti puluhan peserta itu dibuka Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, Rabu (18/5) di Gedung Mempawah Convention Center.

"Pembangunan desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan spras desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan lingkungan secara berkelanjutan," jelas Wabup.

Lebih jauh, Wabup mengatakan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik, pemerintah desa telah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Namun, sampai sekarang pelaksanaannya belum dilakukan secara online.

"Mudah-mudahan dengan ada berbagai evaluasi dan kerja keras bersama, maka di tahun anggaran 2022 ini penggunaan aplikasi SISKEUDES secara online bisa diterapkan pemerintah desa di Kabupaten Mempawah," harapnya.

Disamping keuangan desa,

sambung Wabup, pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka, pengelolaan aset harus dilakukan dengan cermat dengan merujuk pada aturan dan ketentuan yang ada.

"Aset desa harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian agar aset desa dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat desa," katanya.

Wabup mengungkapkan, salah satu permasalahan pengelolaan aset desa di Kabupaten Mempawah berkaitan dengan pengamanan aset desa yang belum memadai dan pengawasan terhadap aset desa belum dilaksanakan secara optimal.

"Pemahaman perangkat desa tentang inventaris aset

desa belum memadai. Maka peningkatan pemahaman ini menjadi hal mendasar dan perlu menjadi skala prioritas bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Mempawah,"

pungkasnya.

Acara yang digelar secara langsung dan virtual itu turut dihadiri Ketua Komite IV DPRD RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala

Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Kalbar, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, dan BPD se-Kabupaten Mempawah. (wah)